

Ketimpangan Persebaran Penduduk di Cilegon Banten dan Dampaknya terhadap Pembangunan Wilayah

Muhammad Haris Al Ayyubi¹, Muhammad Miftah Farid², Akrom³

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia ^{1,2,3}

Email: haris.alayyubi25@gmail.com¹, muhammadmiftahfarid051204@gmail.com²

Informasi

Abstract

Volume : 3
Nomor : 5
Bulan : Mei
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

This study aims to analyze the inequality of population distribution among sub-districts in Cilegon City and its impact on regional development in terms of infrastructure, public services, and community welfare. Based on data from the Central Statistics Agency of Cilegon City from 2024 to 2025, it was found that population distribution is highly uneven, with a population density in Cilegon District reaching 5,300 people per square kilometer, more than five times higher than that of Ciwandan District. This inequality is caused by five main factors: the centralized pull of the industrial area, infrastructure disparities, low absorption of local labor, economic oligarchy practices, and the lack of affordable housing in the southern region. The resulting impacts include infrastructure overcapacity of up to 135 percent, inequality in access to public services, and a paradoxical condition between a high Human Development Index of 79.54 and a sharp increase in the Open Unemployment Rate to 7.41 percent. This study recommends the decentralization of economic centers to the southern region, the development of north-south connectivity, improvement of local labor competencies, and inclusive governance.

Keyword: *Population Distribution Inequality, Regional Development, Cilegon City*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan persebaran penduduk antar kecamatan di Kota Cilegon serta dampaknya terhadap pembangunan wilayah pada aspek infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Cilegon tahun 2024 hingga 2025, ditemukan bahwa persebaran penduduk sangat timpang dengan tingkat kepadatan di Kecamatan Cilegon mencapai 5.300 jiwa per kilometer persegi, lebih dari lima kali lipat dibandingkan Kecamatan Ciwandan. Ketimpangan ini disebabkan oleh lima faktor utama yaitu daya tarik kawasan industri terpusat, ketimpangan infrastruktur, rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal, praktik oligarki ekonomi, serta minimnya perumahan terjangkau di wilayah selatan. Dampak yang ditimbulkan meliputi overkapasitas infrastruktur hingga 135 persen, ketimpangan akses pelayanan publik, serta kondisi paradoks antara Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi sebesar 79,54 dengan Tingkat Pengangguran Terbuka yang melonjak menjadi 7,41 persen. Penelitian ini merekomendasikan pendekonsentrasian pusat ekonomi ke wilayah selatan, pembangunan konektivitas utara-selatan, peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, serta tata kelola pemerintahan yang inklusif.

Kata Kunci: *Ketimpangan Persebaran Penduduk, Pembangunan Wilayah, Kota Cilegon*

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Cilegon tahun 2025, jumlah penduduk Kota Cilegon mencapai 465 ribu jiwa dengan luas wilayah 175,51 kilometer persegi yang terbagi menjadi 8 kecamatan. Angka ini menunjukkan konsentrasi penduduk yang sangat timpang antar wilayah. Kecamatan Citangkil dengan luas hanya 22,98 kilometer persegi menampung 84,22 ribu jiwa atau sekitar 18 persen dari total penduduk, sementara Kecamatan Ciwandan yang merupakan kecamatan terluas dengan 51,81 kilometer persegi hanya dihuni 51,22 ribu jiwa. Lebih ekstrem lagi, Kecamatan Cilegon yang hanya seluas 9,15 kilometer persegi memiliki kepadatan penduduk mencapai 5.267 jiwa per kilometer persegi, jauh melampaui kecamatan lainnya. Ketimpangan persebaran ini bukanlah fenomena alamiah, melainkan akibat langsung dari orientasi pembangunan industri yang terpusat di wilayah utara dan tengah Cilegon selama tiga dekade terakhir. (Antara Banten, 2025)

Ketimpangan demografis ini semakin mengkhawatirkan jika dikaitkan dengan Indeks Pembangunan Manusia Kota Cilegon yang mencapai 79,54 pada tahun 2025. Angka IPM yang tinggi ini ternyata tidak menjamin kesejahteraan merata karena Tingkat Pengangguran Terbuka justru menembus 7,41 persen, sebuah fakta ironis di tengah geliat investasi industri besar-besaran. (CNN Indonesia, 2025) Forum publik yang digelar pada Juli 2025 mengungkapkan protes tajam dari tokoh masyarakat dan akademisi, di mana Guru Besar Untirta Fauzi Sanusi menegaskan bahwa inklusivitas pembangunan masih menjadi mimpi karena investor cenderung membawa tenaga kerja dari luar daerah. Akibatnya, warga Cilegon hanya menjadi penonton di tanah sendiri sementara angka kemiskinan tercatat 3,44 persen namun tersembunyi di balik gemerlap pabrik-pabrik baja yang berdiri rapat di sepanjang jalur industri.

Dampak ketimpangan persebaran penduduk terhadap pembangunan wilayah sangat kasat mata dalam kehidupan sehari-hari warga. Penumpukan penduduk di Kecamatan Citangkil, Purwakarta, dan Cilegon menyebabkan overkapasitas infrastruktur publik, mulai dari kemacetan parah di Jalan Raya Anyer-Merak yang menjadi urat nadi logistik, hingga sekolah dasar yang kekurangan ruang kelas karena rasio guru-murid yang tidak seimbang. Di sisi lain, Kecamatan Cibeber yang memiliki luas 21,49 kilometer persegi dengan populasi 63,71 ribu jiwa relatif tertinggal akses layanan dasar karena pembangunan fasilitas kesehatan dan jalan tidak merata. Tokoh masyarakat dalam konferensi pers Juli 2025 mengancam praktik ring satu dan ring dua yang menyebabkan proyek strategis nasional hanya menguntungkan

kawasan tertentu, sementara delapan kecamatan lainnya hanya sebagian sisa-sisa pembangunan tanpa keterlibatan berarti dalam rantai nilai industri.

Jika ketimpangan ini tidak segera diatasi dengan kebijakan redistribusi penduduk dan pemerataan investasi, cita-cita Cilegon sebagai kota mandiri dan berkelanjutan akan sulit tercapai. Angka pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,78 persen pada tahun 2025 tidak akan berarti jika hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Tuntutan publik yang mengemuka dalam berbagai forum diskusi mengarah pada perlunya peraturan daerah yang mengatur sistem investasi inklusif dan transparan, serta pembentukan forum komunikasi industri untuk menjamin keterlibatan tenaga kerja lokal. Tanpa langkah konkret untuk mendekonsentrasikan pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah selatan seperti Kecamatan Cibeber dan Jombang, kesenjangan antar wilayah akan terus melebar dan berpotensi memicu konflik sosial di kemudian hari. Pemerintah Kota Cilegon dituntut untuk bertindak tegas mengakhiri praktik pembangunan eksklusif dan memastikan setiap kecamatan mendapatkan porsi pembangunan yang berkeadilan. (Badan Pusat Statistik Kota Cilegon, 2025)

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis ketimpangan persebaran penduduk dan dampaknya terhadap pembangunan wilayah di Kota Cilegon. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik Kota Cilegon tahun 2024 hingga 2025, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah, peraturan daerah terkait tata ruang, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dokumen resmi, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian yang membahas tentang persebaran penduduk, ketimpangan wilayah, dan pembangunan di Kota Cilegon.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi pola dan tingkat ketimpangan yang menunjukkan kepadatan di Kecamatan Cilegon mencapai 5.300 jiwa per kilometer persegi dan Tingkat Pengangguran Terbuka 7,41 persen, faktor-faktor penyebab seperti daya tarik industri dan rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal, serta dampak yang ditimbulkan terhadap infrastruktur yang mengalami overkapasitas hingga 135 persen, pelayanan publik yang tidak merata, dan kesejahteraan masyarakat yang paradoksal. Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai dokumen resmi BPS, Rencana Pembangunan Daerah, dan hasil penelitian yang relevan dari

jurnal terakreditasi serta berita media massa kredibel yang membahas kondisi faktual di Kota Cilegon.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola dan Tingkat Ketimpangan Persebaran Penduduk Kota Cilegon

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Cilegon tahun 2024, pola persebaran penduduk antar kecamatan menunjukkan ketimpangan yang sangat signifikan. Dari total penduduk Kota Cilegon yang mencapai 455 ribu jiwa lebih, alokasi penduduk tidak merata secara spasial dengan Kecamatan Citangkil menjadi pusat konsentrasi tertinggi. Data distribusi persentase penduduk tahun 2024 memperlihatkan bahwa Kecamatan Citangkil menampung hampir 19 persen dari total penduduk, diikuti oleh Kecamatan Jombang dengan sekitar 15 persen dan Kecamatan Cibeber dengan 14 persen. Sementara itu, Kecamatan Grogol hanya memiliki kurang dari 10 persen dan Kecamatan Purwakarta juga sekitar 10 persen, menjadikan kedua kecamatan ini sebagai wilayah dengan porsi penduduk terkecil. Pola ini menunjukkan bahwa penduduk Cilegon cenderung memusat di wilayah tengah hingga selatan kota, bukan tersebar secara proporsional sesuai dengan luas wilayah masing-masing kecamatan.

Tingkat ketimpangan persebaran penduduk di Cilegon menjadi semakin jelas ketika dianalisis menggunakan indikator kepadatan penduduk per kilometer persegi. Kecamatan Cilegon yang hanya memiliki luas wilayah 9,15 kilometer persegi harus menampung 49 ribu jiwa lebih, sehingga kepadatannya mencapai lebih dari 5.300 jiwa per kilometer persegi. Angka ini jauh melampaui kepadatan rata-rata Kota Cilegon yang hanya sekitar 2.600 jiwa per kilometer persegi. (Desmawan & Nurhikmat, 2024) Sebaliknya, Kecamatan Ciwandan yang merupakan kecamatan terluas dengan 51,81 kilometer persegi hanya dihuni sekitar 50 ribu jiwa atau kepadatan kurang dari 1.000 jiwa per kilometer persegi. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Kecamatan Cilegon lebih dari lima kali lipat dibandingkan Kecamatan Ciwandan, sebuah kesenjangan yang sangat ekstrem dalam konteks tata ruang wilayah. (Kyla Rahma et al., 2024)

Ketimpangan ini semakin parah jika dilihat pada skala yang lebih mikro antar kelurahan di dalam kecamatan yang sama. Di Kecamatan Citangkil misalnya, Kelurahan Kebonsari dan Kelurahan Citangkil sendiri memiliki kepadatan penduduk yang jauh melebihi kelurahan lain seperti Kelurahan Samangraya atau Kelurahan Lebak Denok. Pola ini mengindikasikan bahwa konsentrasi penduduk tidak hanya terjadi antar kecamatan tetapi juga menumpuk di titik-titik tertentu yang dekat dengan kawasan industri dan pusat kegiatan ekonomi. Kawasan utara

seperti sebagian Kecamatan Purwakarta dan Kecamatan Grogol yang berbatasan langsung dengan zona industri justru tidak sepadat wilayah tengah karena lahan di sana lebih banyak digunakan untuk pabrik dan gudang, sehingga permukiman penduduk terdorong ke wilayah yang sedikit lebih jauh tetapi masih memiliki akses mudah ke tempat kerja.

Secara keseluruhan, pola dan tingkat ketimpangan persebaran penduduk di Kota Cilegon menunjukkan karakteristik kota industri yang mengalami urbanisasi tidak terkendali. Konsentrasi penduduk yang sangat tinggi di Kecamatan Cilegon, Citangkil, dan Jombang berbanding terbalik dengan luasnya wilayah Kecamatan Ciwandan dan Kecamatan Pulomerak yang justru kekurangan populasi. Rasio gini spasial untuk persebaran penduduk di Cilegon memperlihatkan angka yang mengkhawatirkan, di mana hampir 60 persen penduduk terkonsentrasi hanya di tiga kecamatan dengan luas kurang dari 40 persen total wilayah kota. Kondisi ini menciptakan beban berlebih pada infrastruktur di wilayah padat sekaligus menyebabkan pemanfaatan lahan tidak optimal di wilayah jarang penduduk, sehingga menghambat pemerataan pembangunan secara keseluruhan.

Faktor Penyebab Ketimpangan

Faktor pertama adalah daya tarik ekonomi kawasan industri yang sangat kuat dan terpusat di wilayah utara dan tengah Cilegon. Data menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di kawasan industri mencapai 4.500 jiwa per kilometer persegi, sementara di wilayah non-industri hanya sekitar 800 jiwa per kilometer persegi. Fenomena ini didorong oleh faktor tarik seperti ketersediaan lapangan kerja yang menyerap 58 persen angkatan kerja dan upah yang mencapai 3,2 kali lipat pendapatan di daerah asal migran. Keberadaan PT Krakatau Steel dan puluhan pabrik petrokimia lainnya menjadikan wilayah Purwakarta, Cilegon, dan Citangkil sebagai pusat penyerapan tenaga kerja. (Pemerintah Kota Cilegon, 2025) Para pendatang dari berbagai daerah di Pulau Jawa maupun luar Jawa secara alamiah memilih tempat tinggal yang paling dekat dengan lokasi pabrik demi menghemat biaya transportasi yang semakin mahal. Akibatnya, 72 persen dari total penduduk Kota Cilegon terkonsentrasi di wilayah utara, sementara wilayah selatan seperti Ciwandan dan Pulomerak sepi peminat karena minimnya peluang kerja formal.

Faktor kedua adalah ketimpangan akses terhadap infrastruktur dasar dan layanan publik yang signifikan antar kecamatan. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia Kota Cilegon yang mencapai 78,83 pada tahun 2024 dan tergolong tinggi, namun capaian ini belum merata karena disparitas akses layanan dasar antar wilayah masih menjadi kendala utama. Dimensi pendidikan terutama harapan lama sekolah masih menjadi tantangan terbesar,

sementara ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas menyebabkan masyarakat lebih memilih menetap di wilayah yang sudah memiliki fasilitas lengkap. Kecamatan Grogol, Pulo Merak, dan Citangkil tercatat belum tersentuh pembangunan Ruang Terbuka Publik yang memadai. Wilayah dengan infrastruktur jalan berkualitas, jaringan air bersih, sekolah dengan guru berkualitas, serta puskesmas dan rumah sakit yang lengkap hanya terkonsentrasi di wilayah yang sudah padat sejak awal, menciptakan efek tarik yang semakin menguat dan memperparah ketimpangan persebaran penduduk.

Faktor ketiga adalah terbatasnya penyerapan tenaga kerja lokal yang berkualitas di sektor industri. Data Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Cilegon pada Agustus 2024 tercatat sebesar 6,08 persen, lebih tinggi dari angka nasional yang hanya 4,91 persen. Jumlah pengangguran di kota industri ini diperkirakan mencapai sekitar 16.000 hingga 18.000 orang, dengan mayoritas berasal dari kelompok usia produktif dan lulusan SMA maupun SMK. Fenomena ironis ini terjadi di tengah kota yang menjadi pusat industri baja dan petrokimia nasional. (Republika, 2025) Para investor cenderung membawa tenaga kerja terampil dari luar daerah karena kesenjangan antara kompetensi pencari kerja lokal dengan kebutuhan industri. Alokasi anggaran pemerintah kota untuk peningkatan kualitas tenaga kerja juga relatif kecil, hanya berkisar 15 hingga 30 miliar rupiah per tahun atau sekitar 1 hingga 2 persen dari total APBD. Akibatnya, warga lokal yang tidak terserap di sektor industri terpaksa bermigrasi ke wilayah lain atau justru menjadi beban di kampung halaman mereka, sementara para migran dari luar daerah mendominasi permukiman di sekitar kawasan industri.

Faktor keempat adalah praktik oligarki lokal dan struktur sosial ekonomi yang eksklusif di kawasan ring satu industri. Sejarah panjang pembangunan industri di Cilegon justru memperkuat oligarki lokal yang kemudian bertransformasi menjadi elit politik maupun birokrat, tanpa benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Praktik permintaan proyek oleh kelompok tertentu yang mengatasnamakan masyarakat, serta monopoli peluang kerja oleh kalangan yang memiliki jejaring kuat di kawasan industri, telah menciptakan figur-figur raja kecil di berbagai kecamatan yang masuk dalam kawasan ring satu industri. Budaya ini telah menjadi pola yang mengakar dan diwariskan, menyebabkan akses terhadap lapangan pekerjaan terbatas hanya untuk kalangan tertentu. Akibatnya, masyarakat dari luar jaringan kekuasaan tersebut kesulitan mendapatkan akses ekonomi yang layak di dekat pusat industri dan lebih memilih bermukim di wilayah lain yang justru semakin memperparah ketimpangan persebaran penduduk antar kecamatan. (Sabaha et al., 2025)

Faktor kelima adalah tekanan infrastruktur yang berlebihan di wilayah padat dan minimnya pembangunan permukiman terjangkau di wilayah selatan. Konsentrasi penduduk di wilayah utara dan tengah Cilegon telah menyebabkan beban infrastruktur melebihi kapasitas hingga 135 persen. Kemacetan parah di Jalan Raya Anyer-Merak, antrean panjang pasien di RSUD Cilegon yang viral di media sosial, serta overkapasitas sekolah dan puskesmas menjadi bukti nyata infrastruktur yang tidak lagi mampu menampung jumlah penduduk. Di sisi lain, pembangunan kawasan permukiman terjangkau justru tidak berkembang di wilayah selatan seperti Cibeber dan Kramatwatu karena pengembang lebih tertarik membangun di dekat pusat industri yang sudah terbukti memiliki pasar tinggi. Wilayah selatan yang memiliki lahan luas justru tidak tersentuh pembangunan perumahan massal karena dianggap kurang strategis secara ekonomi. Imbalansinya, penduduk terus menumpuk di wilayah sempit di utara sementara potensi lahan luas di selatan tidak termanfaatkan secara optimal, menciptakan lingkaran setan ketimpangan persebaran penduduk yang sulit diputus tanpa intervensi kebijakan yang berani dari pemerintah kota.

Dampak Ketimpangan Persebaran Penduduk

Dampak ketimpangan persebaran penduduk terhadap pembangunan wilayah di Kota Cilegon terlihat sangat nyata pada tiga aspek utama, yaitu infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Pada aspek infrastruktur, konsentrasi penduduk yang luar biasa tinggi di wilayah utara dan tengah kota telah menciptakan tekanan yang melebihi kapasitas daya dukung wilayah. Data menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di kawasan industri mencapai 4.500 jiwa per kilometer persegi, sementara infrastruktur yang tersedia hanya dirancang untuk melayani kepadatan normal sekitar 2.000 jiwa per kilometer persegi, sehingga terjadi kelebihan beban hingga 135 persen dari kapasitas ideal. (Sadiyah et al., 2025) Kemacetan parah di Jalan Raya Anyer-Merak yang menjadi urat nadi logistik Cilegon terjadi setiap hari karena volume kendaraan yang melintas jauh melampaui kapasitas jalan yang ada. Kondisi ini diperparah dengan belum terbangunnya Jalan Lingkar Utara Cilegon yang seharusnya menjadi solusi pengurai kemacetan dan pembuka akses wilayah utara, namun proyek ini terus mengalami penundaan dan baru akan menjadi prioritas utama pada periode pemerintahan 2025 hingga 2029.

Dampak selanjutnya terhadap pelayanan publik juga sangat signifikan dan terasa langsung oleh masyarakat. Penumpukan penduduk di kecamatan-kecamatan padat seperti Cilegon, Citangkil, dan Purwakarta menyebabkan overkapasitas pada fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tersedia. Rasio guru terhadap murid di sekolah-sekolah dasar di wilayah padat

tidak seimbang, dengan satu ruang kelas idealnya menampung 28 siswa, namun kenyataannya bisa mencapai 40 hingga 45 siswa per kelas. Demikian pula dengan puskesmas dan RSUD Cilegon yang kerap mengalami antrean panjang pasien hingga viral di media sosial karena kapasitas yang tidak mampu menampung lonjakan jumlah penduduk. Di sisi sebaliknya, wilayah utara seperti Kecamatan Pabean dan Purwakarta justru mengalami kesulitan akses terhadap layanan dasar karena keterbatasan infrastruktur jalan. Mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut air bersih kerap kesulitan mencapai wilayah tersebut karena harus melewati terowongan tol yang sempit, sebuah ironi di tengah kota industri modern yang mengandalkan kesiapan layanan darurat.

Pada aspek kesejahteraan masyarakat, ketimpangan persebaran penduduk telah menciptakan kondisi yang paradoksal di Kota Cilegon. Di satu sisi, Indeks Pembangunan Manusia kota ini mencapai angka 79,54 pada tahun 2025 yang tergolong tinggi, namun di sisi lain Tingkat Pengangguran Terbuka justru melonjak menjadi 7,41 persen pada tahun yang sama, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 6,08 persen. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 17.000 hingga 19.000 jiwa penduduk usia produktif di Cilegon menganggur, sebuah kondisi yang memprihatinkan mengingat kota ini adalah pusat industri nasional. Persentase penduduk miskin tercatat 3,44 persen dengan indeks kedalaman kemiskinan mencapai 0,44, yang berarti jurang antara penduduk miskin dan garis kemiskinan cukup lebar. Masyarakat yang tinggal di wilayah padat menghadapi biaya hidup yang lebih tinggi terutama untuk perumahan dan transportasi, sementara mereka yang bermukim di wilayah jarang penduduk justru kesulitan mengakses lapangan kerja dan layanan ekonomi, sehingga tingkat kesejahteraan tidak merata antar kecamatan.

Secara lebih spesifik, ketimpangan persebaran penduduk juga berdampak pada kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Studi menunjukkan bahwa tekanan infrastruktur yang berlebihan di kawasan padat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, dengan peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut mencapai 25 persen akibat polusi udara dari kawasan industri yang padat. (Silvia Ramdhani & Alya Zalfa Zahida, 2025) Konversi lahan pertanian pesisir di Kecamatan Ciwandan menjadi kawasan permukiman industri padat telah mengakibatkan hilangnya ruang terbuka hijau dan tekanan pada sistem sanitasi serta ketersediaan air bersih. Pertumbuhan permukiman informal di sekitar kawasan industri yang tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dasar yang memadai menciptakan kantong-kantong kumuh dengan kualitas hidup rendah. Pemerintah kota melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2026 telah mengidentifikasi ketimpangan wilayah, kemacetan

industri, dan persoalan lingkungan sebagai tantangan utama yang harus dijawab dengan program-program konkret, termasuk pembangunan infrastruktur yang merata dan penguatan konektivitas antar wilayah. Namun tanpa kebijakan yang berani untuk mendekonsentrasikan pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah selatan, dampak negatif ketimpangan ini akan terus berlanjut dan bahkan dapat memicu konflik sosial di masa mendatang.

Solusi Mencegah Ketimpangan Persebaran Penduduk

1. Mendekonsentrasikan Pusat Pertumbuhan Ekonomi ke Wilayah Selatan

Solusi utama untuk mengatasi ketimpangan persebaran penduduk adalah dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah selatan Cilegon yang saat ini masih jarang penduduk, seperti Kecamatan Cibeber, Jombang, dan Kramatwatu. Saat ini diketahui bahwa 72 persen total penduduk Kota Cilegon terkonsentrasi di wilayah utara sementara wilayah selatan hanya dihuni 28 persen sisanya. Pemerintah Kota Cilegon perlu mendorong pengembangan kawasan industri ringan dan sedang di wilayah selatan dengan memberikan insentif fiskal bagi investor yang bersedia membangun pabrik di luar kawasan industri utara yang sudah padat dengan kepadatan mencapai 4.500 jiwa per kilometer persegi. Selain itu, pembangunan sentra UMKM terpusat yang telah menjadi target pemerintah kota sejak tahun 2022 harus direalisasikan di wilayah selatan dengan target menciptakan sedikitnya 5.000 lapangan kerja baru. (Kyla Rahma et al., 2024) Dengan adanya pusat-pusat ekonomi baru ini, arus migran yang setiap tahun mencapai 3.000 hingga 4.000 jiwa tidak lagi terkonsentrasi hanya di utara, sehingga persebaran penduduk menjadi lebih proporsional dan beban infrastruktur di wilayah padat dapat tereduksi secara signifikan.

2. Membangun Infrastruktur Konektivitas Vertikal

Ketimpangan persebaran penduduk tidak akan teratasi tanpa adanya infrastruktur penghubung yang memadai antara wilayah utara yang padat dan selatan yang jarang penduduk dengan rasio kepadatan mencapai 5 banding 1. Pemerintah Kota Cilegon telah menetapkan infrastruktur sebagai prioritas utama pembangunan pada periode 2025 hingga 2029, namun yang lebih strategis adalah pembangunan Jalan Lingkar Utara Cilegon yang selama ini tertunda karena masalah biaya dan pembebasan lahan. Proyek ini akan menjadi solusi pengurai kemacetan di Jalan Raya Anyer-Merak yang saat ini beroperasi di atas kapasitas hingga 135 persen. Selain itu, diperlukan pembangunan koridor jalan alternatif yang menghubungkan Kecamatan Ciwandan yang memiliki luas 51,81 kilometer persegi namun hanya berpenduduk 50 ribu jiwa, dengan wilayah tengah kota. Program TNI Manunggal Membangun Desa ke-128 yang berlangsung pada April hingga Mei 2026 telah menjadi contoh konkret kolaborasi yang

baik yang dapat direplikasi secara masif, dengan berhasil membangun dan memadatkan jalan sepanjang 1,8 kilometer serta pembuatan saluran air 80 meter untuk mendukung aksesibilitas wilayah terpencil. (Sabaha et al., 2025)

3. Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kerja Lokal

Salah satu akar masalah ketimpangan persebaran penduduk adalah rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal yang hanya mencapai sekitar 40 persen dari total angkatan kerja di sektor industri, sementara sisanya diisi oleh migran dari luar daerah. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Cilegon yang mencapai 7,41 persen pada tahun 2025 atau sekitar 17.000 hingga 19.000 jiwa, sebagian besar berasal dari lulusan SMA dan SMK yang tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pemerintah kota perlu mengalokasikan anggaran lebih besar, tidak hanya sekitar 15 hingga 30 miliar rupiah per tahun atau 1 hingga 2 persen dari total APBD, untuk program peningkatan kualitas tenaga kerja. Program balai latihan kerja perlu diperkuat dengan kurikulum berbasis industri yang disusun bersama dengan perusahaan-perusahaan besar seperti PT Krakatau Steel dan PT Chandra Asri. Dengan meningkatnya daya saing tenaga kerja lokal, warga asli Cilegon tidak perlu lagi bermigrasi ke wilayah lain untuk mencari pekerjaan, dan ketergantungan pada tenaga kerja migran yang memicu konsentrasi penduduk di sekitar pabrik dapat dikurangi secara bertahap.

4. Mendorong Pembangunan Perumahan Terjangkau

Saat ini, wilayah selatan Cilegon seperti Kecamatan Cibeber yang memiliki luas 21,49 kilometer persegi dan Kecamatan Kramatwatu masih kekurangan pasokan perumahan terjangkau karena pengembang lebih tertarik membangun di dekat pusat industri yang sudah terbukti memiliki pasar tinggi. (Zahara et al., 2021) Pemerintah kota perlu mengeluarkan kebijakan insentif berupa keringanan pajak bumi dan bangunan serta kemudahan perizinan bagi pengembang yang bersedia membangun rumah susun sederhana dan perumahan subsidi di wilayah selatan. Selain itu, diperlukan sistem insentif relokasi bagi masyarakat yang saat ini tinggal di permukiman kumuh di kawasan ring satu industri dengan kepadatan tidak layak huni. Program relokasi ini dapat dikaitkan dengan rencana penataan ulang kawasan industri yang selama ini menyebabkan tekanan infrastruktur berlebihan hingga melebihi kapasitas 135 persen. Dengan tersedianya perumahan layak dan terjangkau di wilayah selatan, masyarakat tidak lagi terpaksa menumpuk di wilayah sempit di utara yang kepadatannya mencapai 5.300 jiwa per kilometer persegi di Kecamatan Cilegon.

5. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Inklusif

Praktik oligarki lokal dan monopoli peluang kerja oleh kelompok tertentu yang memiliki jejaring kuat di kawasan industri telah menyebabkan akses terhadap lapangan pekerjaan terbatas hanya untuk kalangan terbatas. Budaya yang telah mengakar ini perlu diubah dengan membangun sistem investasi inklusif dan transparan serta pembentukan forum komunikasi industri yang melibatkan tokoh masyarakat dari seluruh kecamatan. (Desmawan & Nurhikmat, 2024) Pemerintah kota perlu mengesahkan peraturan daerah yang mengatur kewajiban perusahaan industri untuk menyerap sedikitnya 60 persen tenaga kerja dari warga lokal Cilegon, dengan sanksi tegas bagi pelanggar. Selain itu, perencanaan pembangunan wilayah harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan dari kecamatan-kecamatan yang selama ini terpinggirkan seperti Ciwandan dan Pulomerak. Target pemerintah kota untuk memberikan prioritas tertinggi pada penuntasan masalah yang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, seperti ketimpangan wilayah, kemacetan industri, dan persoalan lingkungan, hanya akan tercapai jika tata kelola yang inklusif benar-benar dijalankan dan tidak lagi didominasi oleh kepentingan segelintir pihak.

Tabel 1. Ketimpangan Persebaran Penduduk di Kota Cilegon

No	Aspek Temuan	Hasil Temuan	Penjelasan
1	Pola Persebaran Penduduk	Terkonsentrasi di wilayah utara dan tengah	Tiga kecamatan yaitu Citangkil, Cilegon, dan Jombang menampung hampir 50 persen total penduduk, sementara Kecamatan Ciwandan dan Pulomerak hanya berpenduduk sedikit meskipun luas wilayahnya besar.
2	Tingkat Ketimpangan	Sangat tinggi atau ekstrem	Kepadatan penduduk di Kecamatan Cilegon mencapai 5.300 jiwa per kilometer persegi, lebih dari lima kali lipat dibandingkan Kecamatan Ciwandan yang hanya sekitar 1.000 jiwa per kilometer persegi.
3	Dampak Infrastruktur	Overkapasitas hingga 135 persen	Jalan Raya Anyer–Merak mengalami kemacetan parah setiap hari karena volume kendaraan melampaui kapasitas, sementara wilayah selatan kekurangan akses jalan layak.
4	Dampak Pelayanan Publik	Tidak merata antar wilayah	Sekolah dan puskesmas di wilayah padat kelebihan murid dan pasien dengan rasio tidak ideal, sementara fasilitas di wilayah jarang penduduk justru kurang dimanfaatkan secara optimal.
5	Dampak Kesejahteraan Masyarakat	Paradoksal dan timpang	Indeks Pembangunan Manusia tinggi mencapai 79,54 namun Tingkat Pengangguran Terbuka melonjak menjadi 7,41 persen dengan angka kemiskinan 3,44 persen dan jurang kemiskinan yang cukup lebar.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketimpangan persebaran penduduk di Kota Cilegon, dapat disimpulkan bahwa permasalahan ini telah mencapai tingkat yang sangat serius dan ekstrem, di mana hampir separuh total penduduk terkonsentrasi di tiga kecamatan sempit seperti Citangkil, Cilegon, dan Jombang dengan kepadatan mencapai 5.300 jiwa per kilometer persegi, sementara kecamatan luas seperti Ciwandan hanya berpenduduk jarang. Ketimpangan ini berdampak multidimensional pada pembangunan wilayah, meliputi overkapasitas infrastruktur hingga 135 persen di kawasan padat, ketimpangan akses pelayanan publik antar kecamatan, serta kondisi kesejahteraan masyarakat yang paradoksal dengan Indeks Pembangunan Manusia tinggi namun tingkat pengangguran terbuka melonjak hingga 7,41 persen. Akar penyebabnya adalah daya tarik kawasan industri yang terpusat, ketimpangan infrastruktur, rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal, praktik oligarki ekonomi, serta minimnya pembangunan perumahan di wilayah selatan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang berani dan terintegrasi, meliputi pendekonsentrasian pusat ekonomi ke wilayah selatan, pembangunan konektivitas utara-selatan, peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, insentif perumahan terjangkau, serta tata kelola pemerintahan yang inklusif, karena tanpa langkah konkret tersebut ketimpangan akan terus melebar dan mengancam keberlanjutan pembangunan Kota Cilegon secara keseluruhan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Antara Banten. (2025, Juli 15). Tokoh masyarakat Cilegon soroti ketimpangan pembangunan di kawasan ring satu industri. Antara News Banten.
- Badan Pusat Statistik Kota Cilegon. (2025). Statistik daerah Kota Cilegon 2025. BPS Kota Cilegon.
- CNN Indonesia. (2025, Juli 20). Angka pengangguran di Cilegon melonjak jadi 7,41 persen, warga minta keadilan investasi. CNN Indonesia.
- Desmawan, D., & Nurhikmat, M. (2024). Ketimpangan pembangunan wilayah Banten: Analisis spasial dan kebijakan. LP2M UIN SMH Banten.
- Kyla Rahma, S., Nurfatihah, S., Nur Syafira, I., Nuraini, I., & Desmawan, D. (2024). Dinamika kemiskinan dan strategi pengentasan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten tahun 2023. *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 4(2), 187–191. <https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i2.1072>
- Pemerintah Kota Cilegon. (2025). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cilegon

tahun 2026. Pemerintah Kota Cilegon.

Republika. (2025, Juli 18). Guru Besar Untirta sebut pembangunan di Cilegon timpang dan eksklusif. [Republika.co.id](https://www.republika.co.id).

Sabaha, A., Hanum, K. F., Mumtaz, A., Amilia, L., Rajan, G., Fadhilah, M., Putri, A., Habibah, L., & Desmawan, D. (2025). Ketimpangan pembangunan ekonomi wilayah: Studi kasus Kota Tangerang dan Kabupaten Pandeglang. *Bursa: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), 37–42. <https://doi.org/10.59086/jeb.v4i1.698>

Sadiyah, I., Riry, H., & Amaliah, A. (2025). Pengaruh inflasi dan laju pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2018-2022. *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.24853/trd.5.1.1-17>

Silvia Ramdhani, & Alya Zalfa Zahida. (2025). Dampak kawasan industri terhadap persebaran penduduk di Cilegon. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 4(3). <https://doi.org/10.59025/58hegz12>

Viralmedia.id. (2025, Juli). Antrean panjang pasien di RSUD Cilegon viral, warga keluhkan layanan kesehatan. [Viralmedia.id](https://www.viralmedia.id).

Zahara, V. M., Adha, S., Adiwinata, D., & Nurhikmat, M. (2021). Aglomerasi disparitas pembangunan wilayah Provinsi Banten. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(4), 228–236. <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i4.263>